



Artikel Penelitian

Received: 10 August 2023
Revised: 09 September 2023
Accepted: 02 October 2023

Kata Kunci:
Partisipasi;
Pembangunan

Keywords:
Participation;
Development

INDEXED IN
SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital:
Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Yunus
Jurusan Ilmu Administrasi
Publik Prodi Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Tadulako

EMAIL
yunus29@gmail.com

OPEN ACCESS
E ISSN 2623-2022

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

*Community Participation in Development Planning in Balentuma Village,
Sirenja District Donggala Regency*

Yunus^{1*}, Abdul Hamid², Mahfuzat³, Fitriah Rahmadani⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Ilmu Administrasi Publik Prodi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

Abstrak: Desa di Indonesia diidektikan dengan pusatnya kearifan lokal yaitu sumber dari budaya dan adat istiadat yang terjaga, dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya, demikian pula dengan Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kab Donggala, dimana kearifan local dalam bentuk partisipasi masyarakat, dimana partisipasi tersebut sudah mengalami kemunduran, Menurut Sugiyono (2019:2) "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Dengan demikian, dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh sebuah data yang akurat yang akan diteliti dalam sebuah penelitian Lokasi penelitian di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Sedangkan Informan penelitian ditentukan secara purposive, yang terdiri dari Unsur aparat kecamatan, Unsur aparat desa, dan Unsur tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kab Donggala dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik masih dibidang masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapa-rapat, dan kerja bakti bersama dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam Musrebang dalam pelaksanaan pembangunan. Proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Pertama, internalisasi nilai kebersamaan, kegotongroyongan, keterbukaan dan kejujuran melalui berbagai rangkaian pertemuan dan pelatihan-pelatihan masyarakat. Kedua, pelembagaan partisipasi masyarakat dengan pelibatan aktif masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa. Dan ketiga, penyediaan dana stimulan untuk kejehatraan masyarakat dalam proses pembangunan Desa. Luaran penelitian ditargetkan dalam bentuk jurnal yang akan dipublikasikan secara online Pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan bulan September atau setelah dana penelitian cair.

Abstract: Villages in Indonesia are identified as central to local wisdom, namely the source of culture and customs that are maintained, in every aspect of community life, as is the case with Balentuma Village, Sirenja District, Donggala Regency, where local wisdom is in the form of community participation, where this participation has experienced a setback, according to Sugiyono (2019:2) "Research methods are basically a scientific way to obtain data with certain purposes and uses." Thus, in conducting research it is necessary to have an appropriate research method to obtain accurate data that will be examined in a research. Research location in Balentuma Village, Sirenja District, Donggala Regency. Meanwhile, research informants are determined purposively, consisting of elements of sub-district officials, elements of sub-district officials, Village, and elements of community leaders. The results of the research show that, the level of community participation in Balentuma Village, Sirenja District, Donggala Regency in the implementation of physical and non-physical development is still said to be very low, this is shown by the low enthusiasm of the community to attend meetings and work together in development planning, the community is still low in conveying ideas and concepts in Musrebang in implementing development. The process of preparing village development planning requires strategic steps. First, internalizing the values of togetherness, mutual cooperation, openness and honesty through various series of community meetings and training. Second, institutionalizing community participation by actively involving the community in the planning, implementation and monitoring process of village development. And third, providing stimulant funds for community welfare in the village development process. The research output is targeted in the form of a journal which will be published online. The implementation of this research is scheduled for September or after the research funds are disbursed.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Pages: 1270-1278

Doi: 10.56338/jks.v6i10.4179

LATAR BELAKANG

Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Menurut Ndraha (dalam Huraerah, 2011:110) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi. Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981:154-155) yang mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting : Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006:4). Berkaitan dengan proses pembangunan desa tersebut, maka partisipasi menjadi hal yang penting dilakukan karena partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat diwujudkan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Pada periode awal reformasi, pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi pembangunan. Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dibidang pengelolaan keuangan dan strategi perencanaan pembangunan daerah. Terhadap pemerintah daerah, kebijakan tersebut telah melahirkan dua respon yang berbeda. Pertama, sebagian pemerintah daerah merasa belum siap menerima perubahan paradigma pembangunan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga banyak bupati dan wali kota yang gagap (sock culture) berhadapan dengan pola dan mekanisme pembangunan yang baru termasuk juga kebingungan dalam menggerakkan roda pemerintah. Kedua, justru sebaliknya, banyak bupati dan wali kota karena memiliki kewenangan luas berubah menjadi raja-raja kecil didaerah. Kewenangan tersebut menjadi instrumen kekuatan mengatur daerah berdasarkan "kreatifitas" yang terkadang melampaui batas kewenangannya itu sendiri.

Konsepsi pembangunan berbasis pedesaan merupakan konsep pembangunan yang mampu merangsang masyarakat Desa, sehingga gerak majunya menjadi otonom, berakar dari dinamika sendiri dan dapat bergerak atas dasar potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Selain itu, suatu pembangunan tidak akan berhasil dan bertahan, jika pembangunan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis- struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Istilah otonom desa tidak digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Namun kedua ini menyebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Berangkat dari suatu kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan Bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpuh pada aspirasi masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat Desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertugas sebagai fasilitator dan motifator, ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam "kegotong royongan" yang saat ini sudah mulai terkikis.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tentang Desa tersebut dibuat untuk menggantikan peraturan Perundang-undangan terkait dengan Desa yang sudah ada sebelumnya. Pasal 23 UU No.6 Tahun 2014 yang juga memberikan penegasan, bahwa Pemerintahan

Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yang dimaksud Pemerintah Desa, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU No. 6 Tahun 2014, adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peluang dari pengembangan otonomi Desa yang demokratis tampak terbuka lebar dimana masyarakat berhak memperoleh informasi, melakukan pemantauan serta melaporkan semua aktivitas yang dinilai kurang transparan kepada pemerintah Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sehubungan dengan itu keberadaan dan kepedulian masyarakat desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri menjadi perhatian utama bagi seluruh penyelenggara pemerintah Desa. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diharapkan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Desa yang baik dan terangsparan dan akuntabel

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dengan demikian, dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh sebuah data yang akurat yang akan diteliti dalam sebuah penelitian Lokasi penelitian di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Sedangkan Informan penelitian ditentukan secara purposive, yang terdiri dari Unsur aparat kecamatan, Unsur aparat desa, dan Unsur tokoh masyarakat.

HASIL

Tinjauan Umum Musrenbang di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum musyawara tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencan Kerja Pembanguna Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilakukan setiap Bulan Januari dengan menngacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desan (RPJM Desa). Setiap Desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara memotret potendi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Pembangunan tidak dapat berjalan maju apabila salah satu dari tiga komponen tata Pemerintahan (pemerintah,masyarakat dan swasta) tidak berperan atau berfungsi, karena itu Musrenbang juga merupakan forum Pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa. Adapun tujuan dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) antara lain sebagai berikut:

Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan Desa yang akan menjadi bagian penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilihan sebagai berikut: 1) Priorotas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya Desa/masyarakat. 2) Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa sendiri dan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain; 3) Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan memlui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah Daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten /kota atau APBD provinsi;

Menyepakati tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program Pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Berdasarkan pendapat Sumadiningrat (1999:69) bahwa untuk mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan maka diperlukan suatu strategi perencanaan dalam proses pembangunan. Perencanaan pembangunan idealnya tidak lagi diarahkan pada pola *top down* yang bersifat mobilisasi seperti yang selama ini terjadi. Perencanaan pembangunan yang partisipatif lebih mencerminkan adanya demokrasi untuk terciptanya *good governance* (Pemerintahan Yang Baik).

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sumadiningrat di atas, bahwa Musrenbang merupakan sebuah strategi pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di wilayah mereka. Pemerintah tidak lagi melaksanakan pembangunan yang berpola *top down* dengan mobilisasi masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah berdasarkan partisipasi masyarakat melalui aspirasi yang diberikan dalam wadah Musrenbang.

Pendapat Sumadiningrat sejalan dengan yang diungkapkan oleh Subari dalam Prasetyo (2006:3) bahwa pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikuti sertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*forum and with people*) dan koordinasi antar sektor serta kelembagaan yang ada di desa. Melalui proses semacam ini maka keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat dapat disalurkan dan diwujudkan dalam program pembangunan.

Konsep diatas sesuai dengan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antara fungsi pembangunan pusat dan daerah serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dari bawah dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka melalui Musrenbang.

Perencanaan pembangunan di daerah melalui Musrenbang dimulai dengan Musrenbang Desa, karena dalam melakukan perencanaan pembangunan tersebut dimulai melalui pemerintah paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu pemerintah Desa dengan mengikut sertakan masyarakat secara aktif (*participatory*) untuk menentukan prioritas pembangunan yang ada dilingkungan mereka.

Dengan partisipasi masyarakat dengan Musrenbang Desa, perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian tentang partisipasi masyarakat di Desa Balentuma dengan menggunakan Teori Ericson yang terdiri dari partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan. Berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian tersebut, yaitu:

Partisipasi Dalam Tahap Perencanaan (*Idea Planing Stage*). Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat melalui usulan, saran dan kritik serta kehadiran masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Partisipasi masyarakat dalam tahap penyusunan rencana dengan memberikan usulan-usulan mengenai program, keaktifan memberikan saran dan kritik serta tingkat kehadiran masyarakat dalam pertemuan terkait dengan musyawarah rencana pembangunan di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja. Adapun partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah dengan cara melibatkan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi, yang merujuk pada dukungan masyarakat (keterlibatan masyarakat) dalam tahap perencanaan kegiatan musrenbang, serta adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang telah diadakan.

Hasil wawancara dengan pihak unsur aparat kecamatan adalah :

Bahawa keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa baik fisik maupun non fisik merupakan hal yang sangat positif sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara unsur aparat desa, unsur tokoh masyarakat, unsur (BPD), dan unsur secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan

Hasil wawancara dengan unsur aparat Desa Balentuma, yaitu :

Kegiatan Musrenbang yang ada di Desa Balentuma tidak direspon baik oleh tokoh-tokoh Masyarakat, seperti kurang adanya dukungan dan peran serta tokoh masyarakat untuk mendukung rencana pelaksanaan kegiatan Musrenbang perencanaan Pembangunan yang di laksanakan pada Tahun 2022. Olehnya itu, kami harapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, bisa dipergunakan Masyarakat sebagai ajang untuk berpartisipasi dan berperan serta dalam memberikan sumbangsuhnya saran-saran demi kemajuan pembangunan Desa.

Hasil wawancara dengan unsur Tokoh masyarakat Desa Balentuma) yaitu :

Kami berharap bahwa dukungan masyarakat tidak hanya sebatas usulan tertulis, tapi harus ada tindak lanjut yang nyata dan ikut menghadiri pertemuan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di tingkat Desa. Sehingga seluruh keinginan masyarakat dapat di ketahui, baik itu berupa saran maupun kritikan yang sifatnya membangun demi kemajuan demi kemajuan Pembangunan di Desa Balentuma.

Hasil wawancara unsur masyarakat adalah :

Bahwa peran masyarakat dalam pembangunan desa merupakan kerjasama yang erat antara aparat desa dan rakyat dalam merencanakan, pembangunan, serta memelihara dan mempertahankan hasil pembangunan dan kompak dan rela bekerja sama tanpa mempeprhatikan perbedaan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran serta dan dukungan Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang ada di Desa Balentuma, masih kuran teralisasi dengan baik oleh Masyarakat, karena Tokoh-tokoh Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri kurang ikut serta berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan harapan bahwa apa yang mereka sarangkan serta yang usulkan belum dapat terealisasi dengan baik.

Seperti yang dikatakan Adimasita (2006:42) bahwa Partisipasi Masyarakat adalah Pemberdayaan Masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan Perencanaan dan implementasi program/proyek Pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan

Pandangan tersebut memberikan makna bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana dan implementasi program yang didapatkan, dimana di dalamnya ada keterlibatan masyarakat. Namun kenyataan yang terlihat menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat hanya sampai pada tingkat Musrenbang, yang artinya bahwa masyarakat tidak ikut dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan

Jadi, dukungan dan peran serta yang dimaksud di sini yaitu keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tahap Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) sampai pada tahap menjaga atau pemanfaatan program yang telah dilaksanakan. Sedangkan informasi yang diperoleh peneliti terkait dengan peran masyarakat yang ada di Desa Balentuma, bahwa Masyarakat cukup merespon kegiatan ini, karena seluruh masyarakat berharap dengan adanya kegiatan ini, dapat meberikan harapan baru bagi masyarakat.

Geddesian dalam Soemarno (2005:26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana, begitupun kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Balentuma. Keterlibatan Masyarakat dapat berupa: 1) *Pendidikan melalui pelatihan*. Pendidikan melalui pelatihan oleh masyarakat Desa Balentuma belum dilakukan secara menyeluruh, Pendidikan mengenai perencanaan Pembangunan hanya diberikan kepada kader tertentu. Peran kader pembangunan pun tidak maksimal karena kemampuan kader dalam memahami perencanaan pembangunan yang terbatas sehingga tidak mampu mengomunikasikan kembali kepada masyarakat secara luas. 2) *partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi*. Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi belum dilaksanakan secara menyeluruh di Desa Balentuma, hanya sebagian kecil yang melaksanakannya. 3) *partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah*. Dalam prakteknya, sebagian besar masyarakat memberikan alternatif rencana dan usulan kepada Pemerintah, meskipun alternatif rencana dan usulan yang disampaikan belum memenuhi sifat spesifik, terukur dan dapat dijalankan.

Berikut ini berbagai macam usulan warga masyarakat Desa Balentuma pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan, tahun 2022.

Tabel 1. Usulan Musrenbang di Desa Balentuma

NO.	Permasalahan	Usulan kegiatan
1	Kantor Desa yang belum selesai di bangun	Pembangunan lanjutan Kantor Desa
2	Jalan berlubang/rusak	Peningkatan badan jalan
3	Jembatan rusak	Perbaikan jembatan
4	Air meluap ke badan jalan(banjir)	Perbaikan drainase
5	Perbaikan rumah ibadah	Renovasi rumah ibadah
6	Perbaikan Gedung Posyandu	Renovasi Posyandu
7	pagar Tk yang sudah rusak	Renovasi pagar tk
8	Pembangunan Deker	Perbaikan deker
9	Penambahan perlengkapan kelompok tani	Bantuan kelompok Tani
10	Penerangan jalan	Pemasangan lampu jalan

Sumber Data Sekunder: Kantor Desa Balentuma 2023

Berdasarkan penjelasan diatas, menjurut peneliti bahwa masyarakat telah menyampaikan aspirasinya terkait dengan usulan yang mereka sampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang di Desa Balentuma.

Hasil wawancara yang dikemukakan diatas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Balentuma telah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah diatur dan disepakati bersama, seperti melakukan dan memberikan usulan-usulan pada saat Musrenbang karena dari hasil tersebut akan diprioritaskan program-program yang menjadi sangat penting dari Desa.

Berdasarkan uraian dan informasi diatas, Peneliti berasumsi Bahwa Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan di Desa Balentuma menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat kurang aktif. Artinya masyarakat terlibat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dengan aktif memberikan usulan dan ide-ide di dalam pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan di tingkat Desa.

Partisipasi di Dalam Tahap Pelaksanaan (*Implementation Stage*). Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk melaksanakan program pembangunan di daerah diperlukan dukungan partisipasi masyarakat sebagai pencerminan semangat rasa kebersamaan, dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan Pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Partisipasi Masyarakat dalam ruang lingkup pemerintah merupakan berbagai bentuk keikutsertaan masyarakat sebagai Warga Negara dalam proses pelaksanaan pembangunan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keperan sertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Adapun yang dimaksud Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan Musrenbang pada penelitian ini yaitu keterlibatan seseorang atau masyarakat pada tahap pelaksanaan suatu kegiatan, yang merujuk pada partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan ide-ide yang dapat memberikan manfaat terhadap Pembangunan. Serta peran masyarakat dalam memberikan bantuan berupa tenaga, uang dan barang/jasa.

Informasi yang diperoleh peneliti bahwa, jumlah masyarakat yang terlibat pada saat Musrenbang cukup banyak jumlahnya, tidak seperti Musrenbang sebelumnya. Berdasarkan pengalaman tersebut, bahwa rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan Desa dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti rendahnya rasa memiliki dari masyarakat atas program pembangunan yang disusun, akibatnya berkelanjutan (*sustainability*) dari program yang dilaksanakan tidak terwujud. Program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya dan munculnya biaya transaksi (*transaction cost*) yang sangat mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dari program pembangunan sehingga seringkali muncul penolakan atas program yang dilaksanakan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritis mengandung banyak kelemahan. Misalnya partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (Desa/Kelurahan) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan dimuali dari Musrenbang Desa/Kelurahan hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak dapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud Keterlibatan kami hanya sebatas Musyawarah Rencana Pembangunan saja, itu pun belum tentu usulan yang kami ajukan bisa terealisasi, karena Tahun-tahun sebelumnya masih banyak aspirasi masyarakat yang tidak dilaksanakan, sehingga mengakibatkan kami merasa apatis dan tidak percaya lagi, tetapi kami tetap berharap semoga aspirasi kami bisa direalisasikan.

Menurut peneliti bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan, karena tidak adanya keseriusan pemerintah untuk memberikan bantuan yang telah tertulis dalam kesepakatan bersama. Sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap pelaksanaan musyawarah. Selain itu adanya kecenderungan tingkat kehadiran stakeholders penting dalam perencanaan pembangunan seperti kader pembangunan, tokoh adat dan tokoh pemudah relatif rendah, serta tingkat keaktifan peserta relatif rendah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta yang pernah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan bahwa kehadiran peserta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tersebut semata-mata hanya memenuhi undangan saja, sehingga kehadirannya lebih banyak sebagai pendengar.

Partisipasi di Dalam Pemanfaatan (*utilitazion stage*). Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pemanfaatan pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dalam penelitian ini adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan suatu proyek yang telah selesai dikerjakan, dengan merujuk pada peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang telah selesai dikerjakan, serta kepedulian masyarakat untuk mempergunakan sesuai dengan manfaatnya untuk kepentingan bersama.

Menurut peneliti bahwa, dengan adanya proses pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan, akan muncul suatu sistem evaluasi dari

kegiatan penata program pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pembangunan selanjutnya. Dengan pendekatan partisipasi masyarakat diharapkan terciptanya kesepakatan dan atauran main di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial disebabkan program pembangunan yang disusun sesuai dengan aspirasinya. Selain itu juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat (*sense of belonging*) terhadap program pemanfaatan yang sejalan dengan terekomendasinya aspirasi mereka dalam program pembangunan tersebut, yang pada akhirnya dapat terwujud pembangunan yang efisien dan efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kab Donggala dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik masih dibidang masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat, dan kerja bakti bersama dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam Musrebang dalam pelaksanaan pembangunan. Proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Pertama, internalisasi nilai kebersamaan, kegotongroyongan, keterbukaan dan kejujuran melalui berbagai rangkaian pertemuan dan pelatihan-pelatihan masyarakat. Kedua, pelembagaan partisipasi masyarakat dengan pelibatan aktif masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa. Dan ketiga, penyediaan dana stimulan untuk kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan Desa. Luaran penelitian ditargetkan dalam bentuk jurnal yang akan dipublikasikan secara online Pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan bulan September atau setelah dana penelitian cair.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimasita Rahardjo. 2006. Pembangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adi Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Fisip. UI Press. Jakarta.
- Bratakusuma R. Deddy Supriady. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi Dalam mewujudkan Otonomi Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- B.S .Muljana.2001. Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V. Jakarta: UI- Press.
- Dusseldorp, D.B.W.M. 1981. Participation in Planned Development Influence by Govern-ments of Developing Countries at Local Level in Rural Areas. Wageningen Agricul-tural University. Utama. Jakarta.
- Djadmiko. 2005. Perilaku Organisasi. Alfabeta. Bandung.
- Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan. Yogyakarta: UHaindo dan Offset.
- Fakih, Mansour.2001. Analisi Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Lexi J Moleong 2017, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung
- Mikkelsen Britha. 1999. Metode Penelitian Partisipasi Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat. PT. Rineka Cipt. Jakarta.
- Riyadi dan Supriyadi B. Deddy. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia, Jakarta.
- Rasimin. 2018. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Kualitatif. In Mitra Cendekia (pp. 1–37). [http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4494/1/METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Praktis Kualitatif.pdf](http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4494/1/METODOLOGI_PENELITIAN_Pendekatan_Praktis_Kualitatif.pdf)
- Roger, dalam Agus Suryono, 2001, Teori dan Isu Pembangunan, UM-Press, Jakarta
- Sugiyono, 2019, Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif dan R.D. Alfabeta, Jakarta.
- Slamet Y.1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Soekanto Soejono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. PTRaja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sumodiningrat Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS. Gramedia Pustaka
- Dusseldorp, D.B.W.M. 1981. Participation in Planned Development Influence by Govern-ments of Developing Countries at Local Level in Rural Areas. Wageningen : Agricul-tural University. Utama. Jakarta.
- Susanto Hari & Asep S. 2000. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (Kasus Kalimantan Slamet, M.(ed). 1985. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
- Tjokroamidjojo Bintoro. 2001. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Tjokroamidjojo Bintoro. 1996. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Tjokroamidjojo Bintoro. 1996. Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Trijono Lambang. 2007. Pembangunan Sebagai Perdamaian, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- UNAPDI. 1980. Local Level Planning and Rural Development. New Delhi. Concept Publishing Company. Barat). PT. Sarbi Moeharni Lestari, Bogor.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N).
- Undang-indang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.